

Satpol PP Tindak Aktivitas Galian Tanah di Tangerang

TANGERANG (IM)- Satpol PP Kabupaten Tangerang menegur sekaligus menindak aktivitas pemerataan tanah yang berada di Desa Palasari, Kecamatan Legok.

Pelaksanaan ini dilakukan karena terdapatnya salah satu aktivitas pemerataan tanah yang sudah menyebabkan cercekan tanah dari truk yang menyebabkan jalanan menjadi licin.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi mengatakan menurut informasi di lokasi, aktivitas pemerataan ini dilakukan karena akan dibangun Kebun Buah dan pihak penanggung jawab memiliki izin lingkungan dari warga setempat.

Pihaknya melakukan tindakan dengan menegur penanggung jawab dan menindak agar penanggung jawab membersihkan jalanan yang tercecer oleh tanah.

"Kami lakukan tindakan dengan cara penanggung jawab aktivitas agar membersihkan jalanan yang kotor atas cercekan tanah serta memberikan peringatan yang ditandatangani langsung oleh penanggung jawab aktivitas," katanya, Selasa (11/4).

Fachrul menuturkan, penindakan pada aktivitas pengurangan atau pemerataan tanah merupakan agenda rutin Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Kegiatan ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Untuk masyarakat jika menemukan hal yang mengganggu dan meresahkan ketertiban umum segera laporkan kepada kami," pungkasnya. ● pp

Walkot Tangerang Minta Camat Proaktif Atasi Pengentasan Persoalan Sosial

TANGERANG (IM)- Wali Kota Tangerang, Provinsi Banten, Arief R Wismaniyah meminta seluruh Camat dan lurah bersama jajarannya lebih proaktif membantu upaya pengentasan masalah sosial di Kota Tangerang.

"Tentu menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai aparat dan pengabdian masyarakat untuk terus berkomitmen dan berusaha memecahkan dan menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat," katanya dalam keterangan di Tangerang, Selasa (11/4).

Ia mencontohkan, salah satu upaya untuk mengentaskan permasalahan sosial adalah melalui optimalisasi dan percepatan pembayaran zakat fitrah. Semua OPD, khususnya kecamatan, lurah dan jajarannya di daerah, juga diminta untuk membantu kelancaran pembayaran dan pendistribusian zakat di daerahnya masing-masing.

"Bersosialisasi, kalau perlu terjun langsung jemput bola agar bisa menjangkau dan menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Pendataan dan pendistribusiannya, tolong lebih proaktif dan tanggap karena dinamika sosial di masyarakat ini sangat berubah. cepat, apalagi usai pandemi mereda," katanya.

Wali Kota juga meminta OPD dan jajarannya untuk terus mensosialisasikan berbagai program Pemkot Tangerang terkait pemberantasan masalah sosial. "Terus berkomunikasi dan berkoordinasi, memfasilitasi jika ada masyarakat yang belum terdaftar dan mendapatkan manfaat dari program pemerintah seperti bansos misalnya atau Tangerang Emas untuk UMKM, dan juga anak-anak kurang mampu yang belum mendapatkan beasiswa melalui 'Tangerang Cerdas,'" demikian Arief R Wismaniyah. ● pp



PERTAMINA PATRA NIAGA SUMBAGSEL PASTIKAN STOK BBM MENCUKUPI

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Zibali Hisbul Masih (tengah) berbincang dengan pengawas SPBU saat meninjau SPBU 24.307.167 Jalan Raya Palembang - Jambi KM86, Tanjung Kerang, Sungai Lilin, MuSi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/4). Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan stok BBM dan elpiji di wilayah Sumatera Selatan mencukupi untuk kebutuhan mudik dan Idul Fitri 1444 H.

DATA YANG DISAMPAIKAN KELIRU

Pemkab Tangerang Bantah Kecamatan Pasar Kemis Terpolusi di Asia Tenggara

Berdasarkan pemantauan website dan aplikasi IQAir pada hari Senin (10/4), sekitar pukul 10:00 WIB, status polusi udara di wilayah Kecamatan Pasar Kemis berada pada kondisi sedang (PM 2,5 yaitu 32,2 ug/m3 microgram).

TANGERANG (IM)- Kondisi polusi udara di Kecamatan Pasar Kemis tidak seburuk informasi yang viral di media sosial seastats dan seasia.co pada akun instagramnya.

Pembelaan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik pada Selasa (11/4).

Menurut Taufik, berdasarkan pemantauan website dan

aplikasi IQAir pada hari Senin (10/4), sekitar pukul 10:00 WIB, status polusi udara di wilayah Kecamatan Pasar Kemis berada pada kondisi sedang (PM 2,5 yaitu 32,2 ug/m3 microgram). Beda dengan data unggahan di media sosial yang menobatkan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang sebagai wilayah terpolusi di Asia Tenggara.

Kata Taufik, data yang ramai dalam unggahan medsos terse-

but merupakan data lama, yakni data periode tahun 2022 lalu.

"Data yang disampaikan oleh pelapor dari media sosial Instagram tersebut merupakan data tahun 2022 yang sudah tidak valid," terang Taufik

Dirinya juga mengklarifikasi bahwa data yang diunggah seastats dan seasia.co di akun Instagramnya bahwa Kecamatan Pasar Kemis merupakan wilayah terpolusi di Asia Tenggara pada Tahun 2022 dengan nilai PM 2,5 particles 49,6.

"Di situ jelas, bahwa status ranking hasil IQAir di lokasi Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tidak berada dalam list ranking teratas paling tercemar," jelasnya.

Artinya, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui DLHK dapat mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman dan asri di wilayah Ke-

camatan Pasar Kemis.

"Alhamdulillah hal ini perlu disyukuri, karena ini sebagai upaya kita bersama, dan terlihat dari data bahwa dari hasil IQ Sistem sudah kami cek masih di bawah baku mutu udara," pungkask Taufik.

Camat Pasar Kemis, Sony Karsan mengungkapkan, bahwa perlu kolaborasi bersama dari berbagai pihak untuk meminimalisir polusi udara di Kecamatan Pasar Kemis. Mengingat wilayah Pasar Kemis merupakan daerah padat penduduk dan juga kawasan industri di Kabupaten Tangerang.

"Untuk permasalahan polusi udara di wilayah Kecamatan Pasar Kemis memang membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatasinya,"katanya.

Ditambah lagi, karena dari segi geografis wilayah ini merupakan kawasan industri dan

padat penduduk, hal itulah yang menyebabkan polusi di wilayah Kecamatan Pasar Kemis kurang baik. "Maka dari itu diperlukan kerjasama, serta kolaborasi dari berbagai pihak," ungkapnya.

Sony juga menyampaikan, upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang pun terus digalakan terkait permasalahan lingkungan di Kecamatan Pasar Kemis, salah satunya adalah dengan melakukan edukasi dan imbauan kepada para pelaku usaha, serta masyarakat agar dapat menanam pohon di lingkungan masing-masing.

"Saat ini kami juga sedang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DLHK Kabupaten Tangerang untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha agar mereka dapat menanam pohon di lingkungannya masing-masing," tutupnya. ● pp

Jokowi Tak Ingin Macet Horor di Pelabuhan Merak Terulang Lagi

MERAK (IM)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap kemacetan horor di Pelabuhan Merak tak arus mudik tahun lalu tak terulang pada musim mudik Lebaran Idulfitri 2023. Jokowi meminta semua anak buahnya membuat langkah-langkah antisipasi. Terlebih lagi, akan ada lonjakan pemudik hingga 123 juta orang pada Lebaran tahun ini.

"Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi, sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini," kata Jokowi usai meninjau Pelabuhan Merak, Selasa (11/4).

Jokowi berkata salah satu penyebab macet horor di Pelabuhan Merak tahun lalu adalah kekurangan kapal. Pemerintah sudah menambah kapal sehingga bisa mengangkut 49 ribu orang penumpang. Manajemen pelabuhan juga menjadi hal yang disoroti Jokowi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki pengelolaan pelabuhan saat musim mudik.

"Pelabuhan yang khusus untuk sepeda motor, pelabuhan yang khusus untuk mobil dan kendaraan kecil dan bis, pelabuhan yang khusus kendaraan berat sudah dipisah-pisah. Ini juga sangat bagus," ujarnya. ● pra

JADI TERSANGKA KASUS PENIPUAN

Tiga Bos Pengembang Perumahan Ditahan Kejari Tangsel

TANGSEL (IM)- Tiga bos pengembang perumahan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap ratusan konsumen perumahan, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.

Ketiganya diduga melakukan tindakan pidana penipuan dan penggelapan dengan modal jual beli properti di Cikasungka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. "Benar tiga orang tersangka berinisial MBA selaku Direktur Utama, kemudian TRK sebagai Direktur dan VW sebagai Komisaris, telah kami tahan di Lapas Pemuda Tangerang. Ketiganya kami terima pelimpahan dari Polda Metro Jaya," kata Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Tangsel, Malda Ksastria saat dikonfirmasi, Selasa (11/4).

Sementara itu, Jaksa Peneliti Kejari Tangsel, Tommy Desatria menerangkan, berkas perkara dan barang bukti yang dilimpahkan dari

Penyidik Polda Metro Jaya ke Kejari Tangsel, telah dinyatakan lengkap. Selanjutnya, tim jaksa akan segera melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri Tangerang, untuk dilakukan persidangan.

"Sehabis lebaran kita masuk sidang dengan tiga tersangka pimpinan perusahaan dan komisaris. Dengan Pasal yang dipersangkakan 378 KUHP atau 372 KUHP," ujar Tommy Desatria, jaksa penuntut umum kasus tersebut.

Sebelumnya puluhan warga kabupaten Tangerang mengaku menjadi korban penipuan proyek pengembang perumahan. Mereka mengadu ke kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (1/9).

Mereka datang untuk mengadakan pembelian rumah dan toko yang mereka beli dari pengembang sejak tahun 2016. Rumah dan toko itu tak kunjung dibangun dan terindikasi ada tindak penipuan dan penggelapan. ● pp

DPRD Kota Tangerang Minta Tidak Ada Lagi Penutupan Jalan Dahwa

TANGERANG (IM)- Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tangerang, Sumarti berharap pihak-pihak yang bersengketa di Jalan Dahwa untuk menahan diri selama jalan tersebut sifatnya masih status quo. Selain itu permasalahan jalan yang sudah berumur 40 tahun lebih tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam kunjungannya anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang sengaja melakukan inspeksi dan pengecekan ke Jalan Dahwa yang beberapa kali ditutup oleh perwakilan ahli waris Endang Miharja. Dalam kunjungannya, anggota DPRD Kota Tangerang yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD, Sumarti memintai keterangan dari beberapa warga yang menolak penutupan jalan tersebut dan pihak ahli waris keluarga Endang Miharja.

Dalam keterangannya Ketua RW 01 Manis Jaya Jatuwung, Ade Supiana yang didampingi RT dan tokoh masyarakat menerangkan jalan Dahwa sudah digunakan masyarakat sekitar sejak tahun 1980an, jadi sudah sekitar 40 tahunan.

Menurut Ade, jalan tersebut sudah dihibahkan oleh Endang Miharja kepada warga. "Jadi kami keberatan jika jalan ini ditutup, karena memang jalan ini dipelihara warga dan perusahaan yang ada di sini," ujar Ade.

Namun pernyataan itu dibantah oleh Sinaga, salah satu pengacara keluarga. Dia menyatakan yang dihibahkan hanyalah yang tiga meter. "Kalau tiga meter kami ikhlas, tapi sisanya tetap akan kami pagar," katanya.

Setelah pertemuan, Sumarti memberikan penjelasan kepada wartawan yang berada di lokasi bahwa DPRD mengimbau tidak ada penutupan atau pemagaran terakut sengketa jalan Dahwa. "Karena semuanya kan masih dalam proses, jadi kami minta pihak, yakni ahli waris Bapak Endang Miharja tidak melakukan kegiatan apapun sebelum statusnya clear," ujar Sumarti kepada wartawan, kemarin.

"Kedatangan kami ke mari untuk melihat langsung kondisi jalan Dahwa yang katanya hendak ditutup oleh ahli waris Endang Miharja. Kami me-

lihat lebar jalan dan mencari keterangan dari saksi-saksi di lapangan. Kedatangan kami menyusul pertemuan sebelumnya soal adanya keluhan warga terkait rencana penutupan jalan," kata Sumarti.

Menurutnya, dari keterangan tokoh masyarakat dan pejabat RT/RW setempat jalan ini memang sudah digunakan selama 40 tahunan dan lebarnya memang 7 meter, lebih sementara dari pihak ahli waris menyatakan yang diwakafkan hanya 3 meter.

"Ini kan yang ingin kita cek, nanti kami akan memanggil pihak BPN mengenai batas-batas tanah dan jalan baru semuanya menjadi clear. Kami juga akan melaporkan dulu hasil survei lapangan kami ke Ketua DPRD dan kami akan menjadwalkan pemanggilan BPN di persidangan selanjutnya. Sebab tadi dari pihak ahli waris complain bahwa ukuran yang dibuat BPN berubah-ubah, nanti di rapat berikutnya kami akan bahas masalah ini agar makin jelas," ujar anggota DPRD dari PDIP ini. ● pp

Sejumlah santri membawa koper di Pondok Pesantren Darussalam, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (11/4). Sebanyak 1.400 orang santri dari berbagai daerah mudik lebih awal pada masa liburan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.



PERAWATAN SATWA KASUS PENYELUDUPAN

Petugas menunjukkan labi-labi berjenis moncong babi (*Carettochelys insculpta*) di ruang transit Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (11/4). BKSDA Jawa Timur menerima titipan untuk perawatan sekitar 5.632 satwa labi-labi berjenis moncong babi asal Papua yang disita dari upaya penyeludupan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Puskesmas di Kota Tangerang Gelar Vaksinasi Jelang Mudik Lebaran

TANGERANG (IM)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang melalui 38 Puskesmas se-Kota Tangerang menggelar layanan vaksinasi COVID-19 mulai tanggal 10 - 14 April 2023 menjelang momen mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Lebaran 2023.

Kepala UPT Puskesmas Kunciran, Dokter Darsono di Tangerang, Selasa (11/4), menuturkan, layanan vaksinasi ini diselenggarakan sebagai upaya menyempurnakan angka kekebalan COVID-19 di Kota Tangerang yang telah mencapai 100 persen.

Tidak hanya itu layanan vaksinasi juga dilakukan sebagai upaya menghadirkan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam menyambut momen mudik Lebaran.

"Untuk jenis vaksin yang disediakan adalah jenis INAVAC dengan jumlah yang terbatas. Oleh karenanya layanan vaksinasi ini dibuka untuk semua, bagi yang ingin dosis 1, dosis 2 bagi yang sebelumnya INAVAC, booster 1 bagi yang mendapatkan dosis 1 dan 2 berjenis INAVAC dan Sinovac, serta booster 2 bagi yang booster 1 berjenis Sinovac saja," katanya.

Ia melanjutkan UPT Puskesmas Kunciran untuk saat ini belum menyediakan layanan vaksinasi bagi peserta di bawah usia 18 tahun, ibu hamil, dan ibu yang sedang

menyusui. Hal ini mengingat disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada.

"Layanan vaksinasi kali ini diperuntukkan bagi yang memiliki jarak dosis 2 ke booster 1 minimal 3 bulan, dan memiliki jarak booster 1 ke booster 2 minimal 6 bulan. Bagi masyarakat yang sesuai dengan persyaratan, bisa langsung datang ke lokasi dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan administrasi," tambahnya.

Selain itu imbauan layanan vaksinasi ini diharapkan dapat tersebar ke masyarakat luas secara maksimal, mengingat vaksinasi sangat dibutuhkan untuk kesehatan maupun keperluan lain, seperti persyaratan dokumen bagi masyarakat yang akan menjalankan mudik Lebaran dengan transportasi umum.

"Layanan vaksinasi ini akan sangat penting karena relevan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, terutama menjelang momen mudik Lebaran ini jumlah permintaan vaksinasi akan sangat melonjak tinggi, mengingat beberapa program mudik Lebaran dan transportasi umum mengharuskan adanya validasi dokumen telah tervaksinasi. Jadi, masyarakat bisa datang, menyambut, dan memanfaatkan layanan vaksinasi ini sejak jauh-jauh hari, untuk kelancaran agenda mudik," ujarnya. ● pp